

PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI ASEAN

Parimin¹⁾, M. Umar Maya Putra²⁾

SMK Negeri 1 Tanjung Pura¹⁾

Fakultas Ekonomi Universitas Al Azhar Medan²⁾

umar_yazli@yahoo.com²⁾

Abstrak

Indonesia telah berhasil melewati masa-masa sulit saat diterpa krisis ekonomi yang cukup berat pada tahun 1998. Krisis yang bermula dari jatuhnya nilai tukar rupiah itu kemudian merontokkan bangunan ekonomi yang telah dicapai lebih dari tiga dasa warsa. Setelah lebih dari satu dasawarsa pemulihan ekonomi dari krisis, kini kondisi perekonomian telah bangkit menuju kemajuan. Bahkan saat datang krisis di belahan dunia Eropa dan Amerika Serikat, perekonomian nasional tetap mampu bertahan dari dampak krisis tersebut. Meski masa-masa suram telah berlalu, tetapi berbagai ganjalan dalam perekonomian masih muncul. Tantangan pembangunan nasional kita adalah menciptakan pertumbuhan yang inklusif guna mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi harus bisa dinikmati secara merata sehingga tidak menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi pada satu sisi melahirkan banyak kelas menengah baru, tetapi di sisi lain memunculkan ketimpangan yang masih cukup tinggi. Beranjak dari keterpurukan ekonomi, tantangan serta pertumbuhan ekonomi tersebut, maka untk menyongsong datangnya MEA 2015 yang dipercepat dari tahun 2020, Indonesia harus berperan aktif di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan, serta mengambil langkah-langkah strategis dan memperkuat informasi dan teknologi.

Keywords: *globalisasi, ekonomi kerakyatan, asean, IT*

1. Pendahuluan

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu mengubah cara pandang, pola pikir, dan pola kehidupan manusia. Kekhawatiran terhadap kelangkaan (*scarcity*) barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, tampaknya telah semakin berkurang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi telah mampu mendorong terciptanya penemuan-penemuan yang dapat menghambat kelangkaan barang dan jasa. Melalui inovasi, riset, dan pengembangan yang terus-menerus, telah mampu menciptakan produk barang dan jasa baru yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk barang dan jasa apa saja yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen dapat disediakan dan dipenuhi oleh produsen. Siapa saja yang berminat dan memiliki daya beli dapat memilih, meminta, dan membeli produk-produk baru, seperti handphone baru, mobil baru, TV baru, dan produk baru lainnya. Bahkan siapa saja yang memiliki potensi untuk membeli barang dan jasa dapat membelinya dengan mudah.

2. Kajian Pustaka

2.1. Ekonomi Kreatif

Proses tarik-menarik antara perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi telah mampu menghambat kelangkaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen [6]. Kelangkaan barang dan jasa dan kebutuhan yang terus meningkat telah mendorong usaha manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan telah mendorong kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi menciptakan berbagai inovasi produk barang dan jasa, yang berarti menghambat kelangkaan. Dengan demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi dapat mengatasi kesenjangan antara antara barang dan jasa serta kebutuhan yang sering meningkat. Kelangkaan bahan pangan dapat diatasi dengan ditemukannya bibit unggul, kelangkaan sumber energi bahan bakar minyak bumi dapat diatasi dengan dikembangkannya energi tenaga air, matahari, dan angin. Disamping penemuan berbagai produk barang dan jasa, ditemukan pula berbagai metode atau teknik yang lebih efisien dan produktif, seperti metode dan teknik produksi baru, rekayasa baru, metode distribusi baru, teknik pemasaran baru, strategi-strategi baru lainnya.

Disamping telah ditemukannya produk-produk baru, telah tercipta juga sarana transaksi ekonomi baru yang mempermudah, lebih efisien dan lebih efektif, seperti sistem pembayaran *online*, sistem pemesanan *online*, dan semua sistem transaksi elektronik telah mempermudah transaksi ekonomi dan merangsang keinginan dan kebutuhan konsumen untuk meminta dan membeli barang dan jasa baru. Penemuan *microsoft*, kartu kredit (*credit card*), sistem pesan singkat (*short message system*), dan sistem pembayaran elektronik telah mempermudah transaksi ekonomi. Sistem pembayaran tersebut lebih terjamin, cepat, tepat, hemat, akurat, dan memudahkan pergerakan arus barang dan jasa secara global.

Pada era revolusi industri yang terjadi pada abad ke-17, usaha kreatif mulai berkembang melalui penemuan mesin-mesin industri yang mampu menciptakan berbagai produk barang dan jasa secara massal. Ahli ekonomi dan jurnalis Prancis yang hidup selama Revolusi Prancis, Jean Baptiste Say adalah orang yang menemukan istilah *entrepreneur*. Beliau adalah ahli ekonomi yang memperkenalkan gagasan perubahan dan ketidakpastian sebagai sesuatu yang normal dan bahkan positif. Kemudian diikuti oleh Schumpeter (1934), yang berpandangan bahwa penemuan-penemuan tersebut merupakan hasil dari kreativitas dan inovasi para *entrepreneur*. Joseph Schumpeter adalah salah seorang ahli ekonomi yang mengemukakan peran *entrepreneur* sebagai aktor dalam ekonomi kreatif. Menurutnya, para *entrepreneur* menemukan sumber daya baru, proses produksi baru, teknologi, dan metode baru, organisasi usaha baru, dan pasar-pasar baru. Para *entrepreneur* menciptakan kebaruan (*novelty*) melalui inovasi. Dengan cara berinovasi, para *entrepreneur* mengubah struktur yang telah ada atau membuat tidak stabil. Maksudnya, dengan cara kreativitas dan inovasi para *entrepreneur* membuat keadaan tidak statis, tetapi dinamis atau selalu berubah sehingga membuat tidak stabil [3].

2.2. Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi

Bangsa Indonesia sudah lebih dari setengah abad hidup dalam alam kemerdekaan. Namun, pelaksanaan pembangunan nasional selama ini yang sejatinya bermuara pada keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat NKRI justru berujung pada keterpurukan dan pelapukan berbagai segi kehidupan. Mayoritas rakyat NKRI hidup dalam kesulitan sosial ekonomi yang tak berpengharapan, kalah bersaing dan bahkan 'dikuasai asing', sehingga jauh tertinggal dari negara lain.

Nasionalisme ekonomi menuntut keberpihakan para pembuat regulasi dan pengambil kebijakan untuk memberdayakan para pelaku ekonomi kerakyatan ini. Nasionalisme ekonomi

harus mampu menguasai, mengolah dan merawat kekayaan alam untuk menghadirkan kembali kedigdayaan Indonesia di era kerajaan abad ke-7 hingga ke-14 sebagai negara agraris dan maritim yang membanggakan dan menyejahterakan secara berkelanjutan.

Saat ini memang kita sudah tidak mungkin menolak agenda neoliberalisme, misalnya kita menolak keluar dari ACFTA. Tentu hal ini akan berdampak buruk bagi kita di mata internasional. Namun tidak ada masalah yang tidak bisa dicarikan solusinya, dan bila ini dilakukan secara serius dan penuh komitmen niscaya kita pasti bisa mengatasi permasalahan ini. Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi, ada beberapa langkah strategi didalam menghadapi perdagangan bebas dan dominasi asing, di antaranya [2] :

1. Proteksionisme

Indonesia, bersama anggota *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)* berharap tidak terjadi perang dagang dengan membuat kebijakan proteksionisme, mengingat kondisi masing-masing negara berbeda. Mengantisipasi hal ini, pemerintah telah mengupayakannya pada pembahasan tingkat menteri di APEC di Lima, Peru pada tahun 2008. Dalam pembahasan itu, anggota tetap akan mengamankan pasar dalam negeri tapi sesuai atura WTO, seperti melarang impor tanpa alasan jelas. Indonesia, misalnya, meski menerapkan instrumen fiskal dan stimulus produk dalam negeri, tetapi tetap akan mencegah langkah penolakan impor yang mendadak dan tanpa alasan jelas.

Bersama negara G20 Indonesia akan mengamankan pasar dalam negeri sesuai aturan WTO. Indonesia pun berniat tetap mengamankan pasar dalam negeri dari membanjirnya produk impor. Pemerintah memastikan bahwa kebijakan tersebut akan sesuai koridor WTO. Di pertemuan ini, anggota sepakat untuk mencegah kebijakan perdagangan yang mendadak dan tidak beralasan. Jika suatu negara menambah tarif bea masuk (BM) maka negara lain juga akan menambah tarif BM. Akibatnya tentu buruk bagi kedua negara dan berimbas pada negara lainnya.

2. Kualitas Produk Berdaya Saing.

Daya saing ini terkait erat dengan kondisi logistik nasional. Bila kita memperhatikan *logistics Performance Index* semakin menurun. Itu artinya, kondisi logistik Indonesia terus memburuk dari tahun ke tahun. Bagi pelaku bisnis logistik, kondisi ini sangat merugikan karena ada biaya lebih dan perlu menekan margin keuntungan agar bisa bersaing. Logikanya, jika urusan logistik tersendat, seperti kasus antrean panjang truk di pelabuhan Merak, Banten, maka biaya pun akan naik. Dampak lanjutannya, harga barang dan jasa menjadi kurang kompetitif.

Logistik di Indonesia makin mahal dan tidak kompetitif. Dibandingkan negara ASEAN lainnya, biaya logistik di Indonesia lebih tinggi. Biaya logistik Indonesia 17 persen, Malaysia 8 persen, Filipina 7 persen, dan Singapura 6 persen. Akibatnya, harga produk di tingkat konsumen serta disparitas harga di pasar lokal cukup tinggi. Tanpa upaya keras menyelesaikannya, biaya logistik yang tinggi itu akan menggerogoti daya saing nasional.

3. Produk Unggulan.

Pemerintah juga mesti meningkatkan pembinaan industri lokal agar dapat memperbaiki kualitas produknya sehingga dapat bersaing dengan produk impor. Sebagai contoh, misalnya jangan sampai orang tidak berani membeli makanan lokal karena dikhawatirkan mengandung formalin atau zat kimia berbahaya lainnya. Salah satu alasannya kenapa orang asing memilih makanan *franchise* dari negara maju adalah jaminan kualitasnya. Dan kita

suka meniru perilaku orang asing karena menganggap mereka lebih maju. Pertanyaannya adalah, bagaimana pemerintah dan pengusaha lokal kita bisa memberi jaminan kualitas terhadap produknya.

4. Dukungan Infrastruktur dan Sistem Logistik Nasional yang Efisien

Sistem logistik berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang memadai memungkinkan sistem logistik menjadi efisien. Sistem logistik yang baik dan efisien dapat meningkatkan daya saing global. Dengan demikian, daya dukung infrastruktur ikut memengaruhi daya saing.

Infrastruktur yang luas dan efisien sangat penting untuk menjamin fungsi efektif dari ekonomi. Infrastruktur merupakan faktor penting dalam menentukan lokasi kegiatan ekonomi yang dapat berkembang di daerah tertentu. Kondisi infrastruktur yang baik mengurangi efek jarak antara daerah, mengintegrasikan pasar nasional dan menghubungkannya untuk pasar di negara dan daerah lain dengan biaya rendah. Selain itu, kualitas dan luasnya jaringan infrastruktur secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan.

5. Gerakan Cinta Produk Dalam Negeri.

Gerakan cinta produk Indonesia merupakan bagian dari upaya menghadapi dominasi asing. Kampanye Gerakan “Aku Cinta Indonesia” bertujuan untuk mengunggah rasa bangga terhadap produk Indonesia. Kegiatan kampanye itu harus melibatkan seluruh komponen bangsa, baik sektor pemerintah, swasta dan kaum intelektual sebagai kreator produk kreatif Indonesia dan masyarakat umum selaku konsumen, serta sektor media untuk mempromosikan gerakan ini. Untuk itu perlu dilakukan suatu rangkaian kegiatan jangka panjang yang terpadu dan berkelanjutan, mencakup empat tahapan kegiatan yaitu membangun kesadaran (*awareness*), membangun minat (*interest*), menumbuhkan rasa setia (*desire*), dan tahapan bertindak mengajak pihak lain (*action*).

Sedangkan “Logo 100 % Cinta Indonesia” memiliki makna yang mudah dimengerti oleh berbagai bangsa dan merupakan petunjuk yang mengingatkan dan menyadarkan bahwa Indonesia pantas maju sebagai bangsa kreatif. Warna- warni yang ada pada logo merefleksikan keragaman dan kekayaan sumber daya, budaya dan kreativitas Bangsa Indonesia. Huruf yang tidak penuh seolah terpotong menunjukkan bahwa kreativitas bangsa Indonesia tidak terbatas.

6. Hilirisasi Industri Sumber Daya Alam.

Salah satu kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah dalam rangka menghadapi era pasar bebas adalah kebijakan hilirisasi industri berbasis SDA. Sungguh sebuah ironi bahwa kita mengekspor bahan mentah ke negara lain. Kemudian, kita mengimpor barang jadi (bahan mentahnya dari bahan mentah yang kita ekspor) dari negeri lain dengan harga yang lebih mahal.

Program hilirisasi penting karena bertujuan untuk menambah nilai tambah komoditas ekspor. Pemerintah bisa membantu dengan menerapkan intensif pajak terhadap ekspor barang jadi yang lebih rendah dari barang mentah dengan harapan eksportir akan mulai berpikir untuk mengekspor barang olahan yang tentu harga jualnya lebih tinggi daripada barang mentah. Contoh kasus ini yang mungkin bisa diolah terlebih dahulu adalah bahan mentah yang cukup berlimpah di Indonesia, seperti kelapa sawit yang dapat diolah menjadi bioenergi, kayu yang diolah menjadi berbagai produk, karet, kakao, dan sebagainya.

2.3. Transformasi Ekonomi Komunitas

Kaum komunis menyelewengkan arti komunitas untuk menandai kebersamaan mereka. Mereka mempolitisir komunitas ini menjadi kendaraan politik pemerintahan komunis dengan menciptakan suatu kesamaan / kehomogenan perasaan senasib sepenanggungan, sama sama miskin, alias anti terhadap kekayaan, padahal arti awal komunitas adalah untuk rakyat, untuk anggotanya. Jadi, pihak yang berkuasa dalam komunitas adalah anggotanya, bukan pemerintah. Jika pemerintah yang berkuasa, akan terjadi penjajahan pemerintah terhadap rakyatnya sendiri. Pemerintah sejahtera dan makmur, negara kaya, tetapi rakyat tetap miskin [6].

Jadi, mari kita kembalikan porsinya ke rakyat, anggota komunitas itu sendiri agar mereka sejahtera, sedangkan bagian pemerintah adalah membuat aturan lain agar antar komunitas tidak saling berbenturan. Komunitas komunitas ini dapat membangun bisnis yang sifatnya konglomerasi, apabila komunitas ini menjadi kuat dalam persatuannya. Banyak yang sudah diwujudkan dalam bentuk koperasi kredit (CU). Sayangnya, kebanyakan koperasi di Indonesia masih memiliki konsep tradisional dan dikelola berdasarkan kepentingan pengurus. Seharusnya koperasi di kelola berdasarkan visi dan misi pendirinya. Pengelola juga harus benar benar orang yang memiliki hati dan dapat menjalankan amanah dengan benar. Tidak mudah menjadi pengurus, karena mereka harus memiliki sikap rela berkorban dan mencintai pekerjaan pelayanan mereka. Kebahagiaan mereka adalah ketika berhasil menghantarkan anggotanya menjadi lebih sejahtera. Namun, gerak koperasi tradisional sangat terbatas. Credit Union adalah koperasi dengan konsep modren yang sangat fleksibel yang dapat menampung aspirasi yang ada dalam komunitas. Dengan bahasan ekonomi komunitas ASEAN, bararti prinsip yang saya sampaikan didepan benar-benar dapat diadaptasi, bahkan untuk komunitas yang lebih luas, kawasan regional ini terdiri dari bangsa-bangsa, dimana mereka menyatukan mata ungnya untuk satu tujuan menyejahterakan kawasan ASEAN dan untuk dapat lebih bersaing dengan kekuatan komunitas ekonomi yang sudah ada sebelumnya, yaitu masyarakat ekonomi EROPA dan USA sebagai kekuatan besar di dunia. Jadi, masyarakat internasional memahami benar arti kekuatan komunitas yang bersatu, menyatukan kekuatannya untuk tujuan yang lebih besar, kesejahteraan masyarakat. Jadi, homogenitas terjadi dalam kesatuan tujuan kesejahteraan komunitas regional yang nilainya diukur dengan semakin tingginya GDP yang akan diperoleh. Pertumbuhan ekonomi komunitas ASEAN akan membuat masing masing negara mengambil spesialisasi didalam kekuatan masing-masing. Mereka akan memperkuat komunitas ekonomi mereka sehingga pesaingnya akan semakin sulit untuk menandinginya, karena tercapainya nilai ekonomis didalam produksinya dan kapasitas produksinya yang sangat besar [6].

2.4 Indonesia Menuju Sukses MEA 2015

Menurut informasi Majalah Masyarakat Ekonomi ASEAN, 2014 terbitan Kementerian Perdagangan RI, bahwa harapan Indonesia bila ingin sukses menuju MEA 2015, beberapa hal terobosan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut [4] :

(1) Fasilitasi Perdagangan di ASEAN.

Sejak tanggal 1 Januari 2010, ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) telah menghapuskan BEA Impor sebanyak 99,65% dari pos tarif yang diperdagangkan, sementara ASEAN-4 (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam) menurunkan BEA Impor sebanyak 98,86% dari pos tarif yang diperdagangkan menjadi 0-5%. Dengan demikian, ASEAN semakin memfokuskan diri pada upaya untuk lebih meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN (ASEAN MEMBER

STATES/AMS). Dalam konteks ini, dan dalam rangka memfasilitasi arus barang serta untuk mempromosikan jaringan kawasan produksi di ASEAN, AMS mengadopsi program kerja fasilitasi perdagangan pada tahun 2008 dan indikator fasilitasi perdagangan pada tahun 2009.

(2) Liberalisasi Tarif di ASEAN

Pada tanggal 1 Januari 2010, ASEAN – 6 telah menghapuskan tarif dari 7.881 pos tarif tambahan sehingga terdapat sejumlah 54.467 pos tarif yang BEA masuknya 0 atau 99,65% dari pos tarif yang di perdagangan dalam common effective preferential tariff (CEPT–AFTA). Dari 7.881 pos tarif tambahan tersebut, terdapat barang-barang dalam sektor untuk ASEAN–4, sejumlah 34.691 pos tarif atau 98,96% dari total pos tarif telah berada pada rata-rata tingkat tarif 0 – 5% setelah tarif dari 2.003 pos tarif tambahan diturunkan menjadi 0 – 5%. Selain barang yang di sebutkan di atas produk seperti bahan olahan, mebel, plastik, semen, kramik, kaca, dan aluminium asal ASEAN juga akan menikmati bebas BEA masuk ke Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand.

(3) Meningkatkan Transparansi Perdagangan

ASEAN saat ini sedang melakukan proses pembentukan ASEAN *Trade Repository* (ATR) yang di targetkan akan berfungsi sebagai gerbang informasi pengaturan di tingkat regional dan nasional pada tahun 2015. ATR tersebut antara lain akan memuat informasi tentang nomenklatur tarif, tarif preferensi yang ditawarkan didalam perdagangan ASEAN. *Trade In Goods Agreement* atau (ATIGA) ketentuan asal barang, hambatan non tarif, aturan-aturan hukum perdagangan dan kepabeanan nasional, persyaratan dokumen (*Documentary Requirements*), dan daftar resmi infortir dan eksfortir dari negara-negara anggota. Sektor prioritas integrasi (*Priority Integration*) sektors atau (PIS) mengharuskan penurunan tarif sebesar 24,15% pos tarif untuk sektor besi dan baja sebanyak 14,92% , mesin dan peralatan mekanis 8,93% , dan bahan kimia 8,3%. Penghapusan tarif dari pos tarif tambahan ini telah menurunkan rata-rata tingkat tarif ASEAN – 6 dari 0,79% pada tahun 2009 menjadi 0,05% pada tahun 2010.

(4) Reformasi Berkelanjutan Atas Ketentuan Asal Barang (*Rules Of Origin / RoO*)

Dengan tujuan untuk mewujudkan suatu sistem perizinan dan pelepasan pengiriman petikemas oleh otoritas BEA Cukai yang lebih cepat, ASEAN sedang mengembangkan Asean Single Window (ASW) yang akan menyediakan sebuah program kemitraan antar lembaga pemerintah dan pengguna akhir (End–User) secara terintegrasi dalam pergerakan barang lintas negara – negara anggota ASEAN. ASEAN secara terus menerus juga melakukan reformasi dan penyempurnaan terhadap peraturan ketentuan asal barang (*Rules Of Origin/RoO*) untuk menjawab perubahan dalam proses rantai produksi global (*Global Value Chain*), termasuk melakukan penyesuaian yang di perlukan. Tujuannya adalah untuk membuat RoO lebih memfasilitasi perdagangan atau setidaknya, sama dengan pengaturan yang tercantum dalam perjanjian FTA ASEAN. Refisi RoO yang dilakukan hingga saat ini telah memperkenalkan kriteria asal lainnya sebagai alternatif terhadap kriteria *regional value content* (RVC) sebesar 40%.

7. Metodologi Penelitian

7.1 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam pembuatan makalah Perekonomian Indonesia dalam era Globalisasi Asean menggunakan sumber sekunder. Sumber sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen [5]. Dokumen yang dihasilkan bisa melalui Data BPS dan Data dari website

www.bi.go.id yang memiliki data terstruktur untuk membuat hasil yang efektif dalam penentuan kebijakan.

7.2 Analisis Data

Analisis data yang akan diambil dengan menggunakan Statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasinya. Penelitian yang dilakukan pada populasi (tanpa diambil sampelnya) jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya

8 Hasil dan Pembahasan

Association of southeast asian nations (ASEAN)/Asosiasi perhimpunan bangsa –bangsa Asia Tenggara didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang di tandai dengan penandatanganan deklarasi ASEAN (Deklarasi Bangkok) oleh para pendirian ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand dan Brunei Darussalam kemudian bergabung pada tanggal 7 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja pada tanggal 16 Desember 1998, saat ini ASEAN beranggotakan 10 (sepuluh) negara. Maksud dan tujuan pembentukan asosiasi, yang meliputi kerja sama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, pendidikan dan bidang lainnya, serta upaya mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan menghormati rasa keadilan dan aturan hukum, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip piagam PBB.

Dengan visi bersama ASEAN sebagai gabungan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang berpandangan terbuka, hidup dalam perdamaian, stabilitas dan kemakmuran, terikat bersama dalam kemitraan pembangunan yang dinamis, maka pada tahun 2003, para pimpinan ASEAN memutuskan bahwa sebuah “Masyarakat ASEAN” harus terbentuk pada tahun 2020. Para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka pada tahun 2007 untuk mempercepat pembentukan komunitas/masyarakat ASEAN menjadi tahun 2015. Komunitas ASEAN terdiri dari tiga pilar, yaitu Masyarakat politik keamanan ASEAN, Masyarakat ekonomi ASEAN dan Masyarakat sosial budaya ASEAN, yang di harapkan bekerja secara bersamaan untuk membentuk Masyarakat ASEAN.

Untuk mencapai Masyarakat ASEAN, ASEAN berpedoman pada piagam ASEAN sebagai landasan dasar. Selain itu, piagam ASEAN juga memberikan status hukum dan kerangka kelembagaan regional di kawasan piagam ini, ASEAN selanjutnya akan berjalan di bawah kerangka hukum yang lebih kuat yang selanjutnya didukung melalui pembentukan sejumlah organisasi/badan yang relevan untuk mendorong proses pembentukan masyarakat ASEAN.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2012 menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2012 mencapai 6,3% dan di tahun 2013 menjadi 6,7%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh kuatnya permintaan domestik yang ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di dunia, khususnya di kawasan ASEAN menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian dunia internasional khususnya di kawasan ASEAN semakin erat.

Pencapaian MEA 2015 melalui rencana aksi yang tertuang dalam 4 pilar MEA, di antaranya Pasar tunggal dan basis produksi regional; arus barang, jasa, dan investasi yang bebas, tenaga kerja yang lebih bebas, arus modal yang lebih bebas, priority integration sectors (PIS), serta pengembangan sektor food agriculture forestry. Indonesia, dalam hal ini telah mengunggulkan produk-produk ekspornya seperti [4]:

- Tekstil dan produk tekstil, sasaran ke negara : Malaysia, Thailand dan Vietnam;
- Elektronik, sasaran ke negara : Malaysia, Thailand dan Vietnam;
- Karet, sasaran ke negara : Singapura;
- Produk hutan, sasaran ke negara : Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam;
- Alas kaki, sasaran ke negara : Singapura;
- Otomotif, sasaran ke negara : Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Myanmar;
- Uang, sasaran ke negara : Vietnam, Singapura dan Malaysia;
- Coklat, sasaran ke negara : Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand;
- Kopi, sasaran ke negara : Malaysia dan Singapura.

Kemudian untuk produk potensial ekspor Indonesia seperti :

- Kulit dan produk kulit, sasaran ke negara : Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina;
- Peralatan dan instrumen medis, sasaran ke negara : Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina;
- Rempah-rempah untuk obat, sasaran ke negara : Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand;
- Makanan olahan, sasaran ke negara : Malaysia, Filipina, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, dan Vietnam;
- Essential oil, sasaran ke negara : Singapura;
- Ikan dan produk ikan, sasaran ke negara : Thailand, Vietnam, Singapura, dan Malaysia;
- Produk kerajinan, sasaran ke negara : Singapura dan Malaysia;
- Perhiasan, sasaran ke negara : Singapura, Thailand, dan Malaysia;
- Bumbu, sasaran ke negara : Vietnam, Singapura, Malaysia, dan Thailand;
- Peralatan tulis selain kertas, sasaran ke negara : Malaysia, Thailand, Thailand;
- Peralatan tulis selain kertas, sasaran ke negara : Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura.

Melihat kondisi Indonesia yang saat ini sedang dalam proses pemulihan dan pembangunan ekonomi di berbagai sektor kehidupan di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Joko Widodo, terpaksa harus mencabut subsidi BBM meskipun dalam kondisi harga minyak dunia lagi turun. Dengan sasaran pengalihan dan pemanfaatan ke sektor-sektor produktif.

Namun di sisi lain bagi kehidupan masyarakat akan berdampak lain. Kerap kali ada yang menanggapi positif dan ada pula yang menanggapi negatif. Sisi positifnya, pembangunan infrastruktur akan lebih ditingkatkan sehingga dampaknya akan dirasakan dalam hal kelancaran arus barang yang akan dipasarkan baik didalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan sisi negatif, biaya produksi semakin besar, sehingga harga-harga barang maupun jasa di pasar semakin melambung tinggi. Bagi kehidupan masyarakat kecil dan miskin ini akan lebih menyusahkan lagi.

Untuk produk-produk unggulan dan produk potensial yang akan dipasarkan akan kena dampaknya sebagai akibat naiknya BBM. Kawasan berdaya saing tinggi: kebijakan persaingan, perlindungan konsumen, HKI, pembangunan infrastruktur, kerja sama energi, perpajakan, e-commerce:

1. Proteksionisme

Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi arus besar neoliberalisasi adalah dengan cara membuat sebuah regulasi yang dilakukan oleh pemerintah. Negara haruslah benar-benar mengimplementasikan fungsinya yaitu sebagai pelindung. Negara harus mampu membuat sebuah kebijakan yang pro rakyat, untuk menanggulangi arus besar neoliberalisme, misalnya pemerintah harus membuat undang-undang terkait masalah investasi.

2. Kualitas Produk Berdaya Saing

Daya saing sangat bergantung pada daya kreativitas dan inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Keduanya merupakan variabel utama pada proses transformasi sosial yang menentukan semangat, corak, sifat, struktur dan perubahan tatanan ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakat. Kreativitas dan inovasi telah menjadi esensi fundamental dalam meningkatkan daya saing bangsa. Sebuah konsepsi yang lazim dikenal dengan *fourth wave of civilization* atau peradaban gelombang ke-4 yang dicirikan oleh tiga pilar yaitu pilar budaya, teknologi dan inovasi.

3. Produk Unggulan

Pemerintah juga mesti meningkatkan pembinaan industri lokal agar dapat memperbaiki kualitas produknya sehingga dapat bersaing dengan produk impor. Sebagai contoh, misalnya jangan sampai orang tidak berani membeli makanan lokal karena dikhawatirkan mengandung formalin atau zat kimia berbahaya lainnya. Salah satu alasannya kenapa orang asing memilih makanan franchise dari negara maju adalah jaminan kualitasnya. Dan kita suka meniru perilaku orang asing karena menganggap mereka lebih maju. Pertanyaannya adalah, bagaimana pemerintah dan pengusaha lokal kita bisa memberi jaminan kualitas terhadap produknya.

8.1 Kerja sama Perdagangan Barang ASEAN-ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)

Dalam rangka mewujudkan pembentukan pasar tunggal dan basis produksi melalui arus bebas perdagangan barang pada tahun 2015 dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih terintegrasi dan menyeluruh. Hal ini memerlukan/pengintegrasian dan penyatuan berbagai tindakan yang telah dilaksanakan maupun tindakan yang akan ditempuh ke dalam suatu template/wadah umum. Untuk mencapai hal tersebut maka pada bulan Agustus 2007, para Menteri Ekonomi ASEAN sepakat untuk memperluas perjanjian Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Agreement (CEPT-AFTA) agar menjadi perangkat hukum komprehensif. Hal ini menghasilkan penandatanganan perjanjian perdagangan barang ASEAN pada Februari 2009.

Beberapa elemen penting ATIGA [1]:

1. ATIGA mengkonsolidasikan dan menyederhanakan seluruh ketentuan yang terdapat dalam CEPT-AFTA, sekaligus memformalkan beberapa keputusan tingkat menteri. Sebagai hasilnya, ATIGA menjaga perangkat hukum tunggal tidak hanya bagi pejabat pemerintahan yang menerapkan dan mengamankan perjanjian tersebut, namun juga bagi pelaku usaha yang menjadi pemetik manfaatnya.
2. Lampiran pada ATIGA menunjukkan jadwal penurunan tarif secara menyeluruh dari setiap negara anggota dan merugikan tingkat tarif yang dikenakan kepada setiap produk per

tahunnya hingga tahun 2015. Hal ini membuat rencana penurunan tarif menjadi lebih transparan dan memberikan kepastian bagi komunitas bisnis. Sebuah pengundangan komitmen juga telah dilakukan untuk menerapkan secara efektif jadwal penurunan tarif sampai dengan tahun 2015.

3. ATIGA mencakup beberapa elemen untuk dapat memastikan terwujudnya di antaranya yaitu: liberalisasi tarif, penghapusan hambatan non-tarif, keterangan asal barang, fasilitas perdagangan, kepabeanan, standart dan kesesuaian, dan kebijakan sanitary and phytosanitary. ATIGA meliputi cakupan komprehensif dari komitmen di bidang perdagangan barang, serta mekanisme penerapan serta pengaturan kelembagaannya. Hal ini akan memungkinkan terbentuknya sinergi dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai badan-badan sektoral ASEAN.
4. Hal ini dapat mensinergikan langkah-langkah yang diambil oleh berbagai unit di ASEAN. Dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan non-tarif, ketentuan mengenai kebijakan non-tarif (NTMS) dalam ATIGA telah dikembangkan lebih jauh melalui kodifikasi tindakan-tindakan, dan melalui penyusunan mekanisme untuk mengawasi komitmen pengurangan hambatan-hambatan non-tarif.
5. ATIGA memberikan penekanan pada langkah-langkah fasilitasi perdagangan dengan memasukan kerangka kerja.

8.2 Kerja Sama Perdagangan Jasa di ASEAN-ASEAN

Untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan jasa antar negara anggota ASEAN (AMS), dibentuklah ASEAN *Framerwork Agreement on Services* (AFAS) pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand oleh Menteri-menteri Ekonomi ASEAN. Liberalisasi perdagangan jasa di bawah kerangka AFAS yang dilaksanakan melalui putaran negosiasi setiap 2 tahun hingga 2015. Dari putaran-putaran perundingan dalam kerangka AFAS, dihasilkan suatu jadwal komitmen yang spesifik yang dilampirkan pada kerangka perjanjian. Jadwal ini sering disebut sebagai paket komitmen jasa.

Setelah enam putaran negosiasi, ASEAN telah menyelesaikan delapan paket komitmen AFAS yang merupakan kontribusi dari seluruh AMS secara progresif dan telah memperdalam tingkah dan cakupan komitmennya untuk menghapuskan secara substansial hambatan-hambatan perdagangan jasa di kawasan Asia Tenggara, baik hambatan yang berbentuk tarif maupun non-tarif. Komitmen tersebut mencakup liberalisasi jasa bisnis, jasa profesional, konstruksi, distribusi, pendidikan, jasa lingkungan, kesehatan, transportasi laut, telekomunikasi, dan pariwisata. Selain itu, terdapat juga empat paket komitmen pada jasa keuangan yang ditandatangani oleh menteri-menteri keuangan ASEAN dan enam paket pada transportasi udara yang ditandatangani oleh Menteri-menteri Transportasi ASEAN.

AFAS dibentuk dengan tujuan antara lain untuk [1]:

- Meningkatkan kerja sama dibidang jasa antara AMS dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, diversifikasi kapasitas produksi serta pasokan dan distribusi jasa, baik antara para penyedia jasa di ASEAN maupun luar ASEAN;
- Menghapus hambatan perdagangan jasa antara AMS;
- Memperdalam dan memperluas cakupan liberalisasi yang telah dilakukan dalam kerangka GATS/WTO yang bertujuan untuk merealisasikan area perdagangan bebas bidang jasa.

Berdasarkan roadmap liberalisasi perdagangan jasa terdapat empat sektor prioritas untuk diliberalisasi pada tahun 2010 (AFAS 8), yaitu transportasi, e-ASEAN, perawatan kesehatan dan pariwisata yang mencakup 80 subsektor. Pada AFAS 8, indonesia telah memberikan fleksibilitas sebanyak 22 subsektor. Sektor yang telah diliberalisasi antara lain

konstruksi, telekomunikasi, pendidikan dan pariwisata. Saat ini perundingan perdagangan jasa telah memasuki AFAS paket 9. Pada tahun 2013, ditargetkan ASEAN dapat menyelesaikan AFAS 9 dengan 104 subsektor dalam sektor logistik untuk diliberalisasi, antara lain jasa pergudangan, pengepakan kargo, kurir, dan jasa transportasi pengiriman barang. Tahun 2015 diharapkan liberalisasi telah mencakup semua sektor yang terdiri dari 128 subsektor (AFAS 10).

AFAS dibahas dalam forum Coordinating Committee on Service (ICCS). Di mana forum tersebut merupakan forum utama sektor jasa di luar jasa keuangan dan transportasi udara, yang mewadahi 155 subsektor jasa berdasarkan klasifikasi GATS W/120. Forum CCS mencakup perundingan di tingkat CCS Leader yang menentukan tahapan liberalisasi di negara anggota ASEAN berupa paket komitmen di bawah AFAS, pertemuan kelompok kerja sektoral dan penyusunan mutual Recognition Arrangements (MRA).

8.3 Kerja Sama Investasi ASEAN-ASEAN Investment Area (AIA)

ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) ditanda tangani oleh Menteri-menteri ASEAN pada tanggal 26 Februari 2009. Sebelum ACIA terbentuk di tahun 2009, ASEAN terlebih dahulu telah memiliki beberapa perjanjian yang bersifat regional di bidang investasi yaitu the 1987 *ASEAN Agreement for the Promotion and protection of investments* (juga dikenal sebagai ASEAN Investment Guarantee Agreement atau ASEAN IGA) dan the 1998 *Framework Agreement on the ASEAN Investment Area* (dikenal sebagai “AIA Agreement”).

Dengan disepakatinya cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN 2015, ASEAN memutuskan untuk meninjau kembali dan merevisi perjanjian di bidang investasi terdahulu, yang kemudian dijadikan perjanjian investasi yang komprehensif, meliputi kerja sama, fasilitas, promosi, liberalisasi dan perlindungan investasi yaitu ACIA. ACIA merupakan perjanjian investasi yang komprehensif yang mencakup manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan pengalihan, dan jasa yang terkait dengan lima sektor tersebut.

8.4 Kerja sama ASEAN di bidang Pangan dan Perlindungan Hutan

Tujuan utama dari pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 adalah untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Produk hasil pertanian dan hasil hutan yang dapat diperdagangkan di tingkat nasional adalah komponen penting untuk mewujudkan pasar tunggal ASEAN. ASEAN, khususnya Indonesia diharapkan siap bersaing di pasar global dengan menawarkan produk yang aman, sehat dan berkualitas. Hal ini dapat dicapai dengan menetapkan harmonisasi kualitas dan standar, jaminan keamanan pangan, standardisasi sertifikasi perdagangan, produk pertanian, peternakan dan perikanan.

Selanjutnya tujuan strategis pengelolaan hutan lestari (PHL) adalah untuk mempromosikan pelaksanaan sumber daya hutan di kawasan ASEAN serta mencegah dan menghentikan praktek-praktek tidak berkesinambungan, termasuk memberantas pembalakan liar dan perdagangan yang terkait, melalui peningkatan kapasitas, transfer teknologi, meningkatkan kesadaran publik dan memperkuat penegakan hukum dan tata pemerintahan. Diharapkan barang dan jasa yang berasal dari hutan mampu memenuhi kebutuhan sekarang, dan pada saat yang sama juga ada kepastian ketersediaan lanjutan dan kontribusinya terhadap pembangunan jangka panjang.

Dalam upaya mencapai tujuan PHL, ASEAN menetapkan Penegakan Hukum Kehutanan dan Pemerintahan atau Forest Law Enforcement and Governance (FLEG) sebagai kondisi awal dan ukuran penting terhadap pengelolaan hutan yang baik.

9 Kesimpulan dan Saran

9.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Para pemimpin negara-negara ASEAN telah berkomitmen kuat untuk mensukseskan MEA 2015;
2. Masing-masing negara akan lebih menjaga produk barang maupun jasa yang lebih berdaya saing global;
3. Untuk mencapai masyarakat ASEAN, ASEAN berpedoman pada PIAGAM ASEAN yang sudah dimulai pada tanggal 15 Desember 2008.

9.2 Saran

Aktivitas penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya cenderung memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan fisiknya, walau tidak sepenuhnya mutlak kondisi apapun itu turut mewarnai aktivitas kehidupan penduduknya.

Indonesia di dalam melaksanakan kegiatan perekonomian di kancah ASEAN telah mampu membawa dampak positif bagi kehidupan rakyatnya. Oleh karena itu di segala bentuk kerjasama negara-negara ASEAN, perlu disarankan sebagai berikut :

1. Perlu dibuat suatu kebijakan persaingan usaha di ASEAN;
2. Perlindungan konsumen di ASEAN;
3. Kerangka kerja Ketahanan dan Keamanan Pangan di ASEAN;
4. Perlindungan Hak kekayaan Intelektual;
5. Penegakan Hukum atas batas-batas wilayah kekuasaan masing-masing negara anggota ASEAN.

Referensi

- [1] Rofiq, Aunur., (2013), *Kemajuan Ekonomi Indonesia*, PT Penerbit IPB Press, Bogor.
- [2] Limbong, Bernard., (2013), *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*, PT Dharma Karsa Utama, Jakarta.
- [3] Elia. (2014), *Transformasi Ekonomi Komunitas*, Andi Offset, Yogyakarta
- [4] Dirjend Kerjasama Perdagangan Internasional, Kemendag RI, (2014), *Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Kementrian Perdagangan RI, Jakarta Pusat.
- [5] Sugiyono., (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung.
- [6] Suryana., (2013), *Ekonomi Kreatif*, Salemba Empat, Jakarta.